

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pengembangan suatu wilayah karena dapat menunjang perkembangan ekonomi masyarakat yang berada di suatu wilayah bahkan dapat menjangkau daerah terpencil atau terisolir agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan menunjang kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan pengembangan jalur laut menjadi alternatif selain sebagai penghubung antar pulau yang tidak dapat dijangkau dengan jalur darat juga sebagai pengalihan pengguna jalur darat yang semakin padat sehingga sedikit mengganggu kelancaran kegiatan transportasi untuk mencapai tujuan tertentu. Transportasi laut dilaksanakan untuk menjangkau pemerataan pembangunan di daerah terpencil atau terisolir. Dalam hal ini pengelolaan wilayah maritim diharapkan dapat menunjang keterlaksanaan kegiatan lainnya seperti kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Transportasi laut yang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah maritim adalah angkutan penyeberangan.

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut orang dan kendaraan beserta muatannya.

Indonesia merupakan negara terbesar dimana 63% wilayah teritorialnya berupa perairan. Sebagai kepulauan terbesar, sektor maritim perlu dikembangkan dengan baik untuk membantu negara dan masyarakat mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Negeri ini memiliki hasil bumi, hasil laut, hasil tambang dan hasil industri yang sangat potensial. Kekayaan tersebut dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun

diekspor keluar negeri. Sejalan dengan kondisi ini mobilitas penduduk dengan berbagai aktifitas membutuhkan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, udara maupun laut, untuk mengangkut hasil bumi/ pangan, sandang/ industri, dari satu pulau ke pulau lain, atau suatu daratan ke ujung daratan lain dengan sarana transportasi.

Pelabuhan Penyeberangan Kendari terletak di Kota Kendari yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Penyeberangan Kendari di selenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara dan diawasi oleh satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kendari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara serta pada sarana Kapal dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau untuk melayani kapal-kapal Penyeberangan Perintis Kendari-Langara memiliki jarak waktu tempuh 3 jam.

Namun dalam penyelenggaraannya masih sering terjadi ketidakteraturan arus lalu lintas baik pada kendaraan maupun penumpang yang keluar dari pelabuhan maupun masuk ke pelabuhan, pada saat bongkar dan muat muatan sehingga menyebabkan *crossing*, yang berdampak menumpuknya kendaraan yang keluar dari area parkir dengan kendaraan yang akan keluar dari kapal.



Gambar 1.1

Kondisi Eksisting Pola arus penumpang dan kendaraan

Tidak diterapkannya sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari mengakibatkan rambu-rambu zona sebagai petunjuk bagi pengguna jasa tidak tersedia di area Pelabuhan. Hal ini mengakibatkan Kendaraan pengantar penjemput penumpang yang sering memarkirkan kendaraan di lapangan parkir siap muat sehingga kendaraan tersebut bergabung dengan kendaraan-kendaraan yang akan menyeberang, hal ini disebabkan kurangnya peralatan dan perlengkapan pendukung seperti rambu-rambu petunjuk maupun rambu-rambu larangan dan juga disebabkan kurangnya personil seperti petugas yang mengatur pola arus lalu lintas di pelabuhan penyeberangan Kendari.

Dalam upaya mewujudkan Pelabuhan Penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan yang tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016. Dalam Peraturan tersebut khususnya pada pasal 2 ayat (2) bahwa Pelabuhan penyeberangan wajib melakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi Pelabuhan penyeberangan.

Berdasarkan uraian dari hasil survey yang dilakukan dan juga dilihat dari kondisi yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan kertas Kerja Wajib ini, yaitu: **“KAJIAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PERSONIL TERHADAP PENERAPAN SISTEM ZONASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan kelengkapan peralatan, perlengkapan dan personil dalam mendukung sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari?
2. Bagaimana upaya peningkatan peralatan, perlengkapan dan personil di Pelabuhan Penyeberangan Kendari?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui kondisi dan kelengkapan peralatan, perlengkapan dan personil dalam mendukung sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari
2. Mengetahui kebutuhan peralatan, perlengkapan dan personil pendukung sistem zona di Pelabuhan Penyeberangan Kendari

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang kepelabuhanan. Penelitian ini juga dapat menjadi pembangunan dan sistem informasi di Pelabuhan tersebut. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi Penulis

Dalam pembuatan KKW ini, penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam mengikuti Pendidikan Diploma III LLASDP dan dapat menjadi referensi bagi adik tingkat sebagai bahan belajar. Serta sebagai persyaratan akhir menyelesaikan Pendidikan.

- 2) Manfaat bagi Lembaga Pendidikan

Menambah koleksi perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, serta sebagai referensi pemecahan masalah penelitian selanjutnya.

- 3) Manfaat bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai evaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk para pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.

- 4) Manfaat bagi masyarakat

Pengguna jasa dapat memperoleh kenyamanan dan ketertiban di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan agar pokok permasalahan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) maka perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu pada Pelabuhan penyeberangan Kendari.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang dilakukan mengenai kebutuhan perlengkapan, peralatan dan personil terhadap sistem zonasi pada pelabuhan penyeberangan Kendari.

3. Metode Analisa yang digunakan

Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) terdapat metode analisa yang digunakan yaitu:

- a. Analisa Penentuan batas zona
- b. Analisa pola arus lalu lintas
- c. Analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan
- d. Analisa kebutuhan personil